

RENCANA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkah dan karuniaNya jugalah, maka Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) Tahun 2025 ini, merupakan pedoman dalam menyusun rumusan Program dan Kegiatan tahun yang akan datang, juga sekaligus merupakan bahan evaluasi rencana kerja tahun lalu serta proyeksi terhadap target capaian kinerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan kritik yang edukatif serta konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dimasa mendatang.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan berguna, psebagai salah satu bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. RUZUAN EFENDI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA, IV /D
NIP.196812101993031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	6
2.2 Program Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Peternakan Tahun 2024	11
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	66
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	74
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	75
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan.....	75
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	77
3.3 Program dan Kegiatan.....	80
IV. PENUTUP	167

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuat sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah Sumatera Selatan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat didefinisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, sedangkan Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya, jika didefinisikan secara utuh bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu. Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok OPD yang selaras dengan Visi, Misi dan Agenda OPD. Selain itu Renja OPD juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti RKPD, Renstra OPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Renja OPD juga merupakan masukan utama dan umpan balik bagi penyusunan RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok OPD juga selaras dengan rencana umumnya seperti RKPD, Renstra OPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

RENJA OPD merupakan penjabaran teknis RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menyusun program/kegiatan dalam jangka waktu tahunan. RENJA OPD disusun sebagai bahan dalam penyusunan RKP Daerah, RKP Pusat, kemudian RKP Daerah diserasikan dengan RKP Pemerintah Pusat melalui Musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Maka Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja (Renja) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010. Format dan Pedoman pelaksanaan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diatur dalam Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman dasar yang di gunakan sebagai dasar menyusun Renja sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Desember 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun yang akan datang;
2. Sinkronisasi perencanaan secara terpadu, terfokus dan terprogram dalam mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan;
3. Sebagai bahan dalam melaksanakan acuan, kebijakan program strategis pembangunan ketahanan pangan Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

4. BAB IV PENUTUP

5. LAMPIRAN

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2024 periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sum-Sel Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rupiah	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	26.723.884.920	24.110.002.936	90,22
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.358.884.920	22.747.315.360	89,70
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.800.000	291.240.991	98,13
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	67.505.128	96,44
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	48.849.403	97,70
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.800.000	174.886.460	98,92
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.038.584.920	17.915.310.913	89,40
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.930.784.920	17.817.242.913	89,40

5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.800.000	98.068.000	90,97
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.000.000	51.638.500	97,43
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.000.000	51.638.500	97,43
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.430.000	707.614.140	99,88
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.000.000	36.974.200	99,93
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.000.000	136.992.950	99,99
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.430.000	53.430.000	100
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	35.000.000	100
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.000.000	89.000.000	100
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	6.292.000	89,89
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	349.924.990	99,98
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.874.770.000	3.409.002.841	87,98
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	17.000.000	100
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	562.400.000	502.760.841	89,40
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.295.370.000	2.889.242.000	87,68
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.300.000	372.507.975	96,18
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.300.000	281.983.975	95,17
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.000.000	90.524.000	99,48
B	PROGRAM	1.290.000.000	1.289.168.300	99,94

	PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
VII	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	90.000.000	89.568.300	99,52
19	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	90.000.000	89.568.300	99,52
VIII	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	
20	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	-	-	
IX	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.200.000.000	1.199.600.000	99,97
21	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.200.000.000	1.199.600.000	99,97
C	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.000.000	73.519.276	98,03
X	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	73.519.276	98,03
22	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	75.000.000	73.519.276	98,03
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6.786.812.647	6.777.707.447	99,87
D	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	511.584.052	504.923.300	98,70
XI	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan	436.584.052	432.676.900	99,11

	Provinsi			
23	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	436.584.052	432.676.900	99,11
XII	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	75.000.000	72.246.400	96,33
24	Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	75.000.000	72.246.400	96,33
E	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.168.628.595	1.168.062.779	99,95
XIII	Penataan Prasarana Pertanian	1.168.628.595	1.168.062.779	99,95
25	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	859.088.000	858.685.418	99,95
26	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau tempat Pelayanan Paramedik veteriner keswan	309.540.595	309.377.361	99,95
F	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225.000.000	223.760.000	99,45
XIV	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.645.000	99,29
27	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	50.000.000	49.645.000	99,29
XV	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah provinsi	75.000.000	75.000.000	100

28	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	75.000.000	75.000.000	100
XVI	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	100.000.000	99.115.000	99,12
29	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000	99.115.000	99,12
G	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.881.600.000	4.880.961.368	99,99
XVI	Pengembangan Penerapan Penyuluhan pertanian	4.756.600.000	4.756.350.615	99,99
30	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4.756.600.000	4.756.350.615	99,99
XVI I	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	125.000.000	124.610.753	99,69
31	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	125.000.000	124.610.753	99,69
	JUMLAH : 31 SUB KEGIATAN	33.510.697.567	30.887.710.383	92,17

Realisasi Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan sampai 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 33.510.697.567,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau (92,17%), Realisasi tidak sesuai dengan target disebabkan terdapat sisa lebih dari beberapa kegiatan yang tidak realisasi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Povinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan didukung dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2. PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2024

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Povinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan didukung dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH (APBD)

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar Rp. 33.510.697.567,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), Anggaran tersebut untuk pembiayaan Urusan Pemerintah Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, sebagai berikut :

➤ URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN

Realisasi Urusan Pemerintah Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 24.110.002.936,- (90,22%) dari anggaran sebesar Rp. 26.723.884.920,- yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Belanja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 296.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Realisasi sebesar Rp. 291.240.991,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). yang terdiri dari :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Target Fisik 100 % Realisasi fisik sebesar 96,44 %

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.505.128,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.494.872,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Target Fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 48.849.403,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah) atau (97,70%) sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.150.597,- (Satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, Laporan Tahunan dan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari anggaran sebesar Rp. 176.800.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Target Fisik 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 174.886.460,- (Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau (98,92%) sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.913.540,- (Satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah). Hasil yang dicapai adalah terlaksannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah atau evaluasi kegiatan-kegiatan Ketahanan Pangan dan Peternakan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 17.915.310.913,- (tujuh belas milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) atau (89,40%) dengan anggaran sebesar Rp. 20.038.584.920,- (Dua puluh milyar tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 19.930.784.920,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), Terealisasi sebesar Rp. 17.817.242.913,- (Tujuh belas milyar delapan ratus juta tujuh belas juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) atau (89,40%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.2.113.542.007,- (Dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 Bulan.
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 107.800.000,- (Seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Target Fisik 100 % Terealisasi sebesar Rp. 98.068.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau (90,97%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.9.732.000,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Realisasi Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 51.638.500,- (Lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau (97,43%) dari anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) Target Fisik 100 % dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 51.638.500,- (Lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau (97,43%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.361.500,- (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Hasil yang dicapai adalah terlaksannya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Realisasi Belanja Administrasi umum Perangkat Daerah sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 707.614.140,- (Tujuh ratus tujuh juta enam ratus empat belas

ribu seratus empat puluh rupiah) atau (99,88%) dari anggaran sebesar Rp. 707.430.000,- (Tujuh ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) Target Fisik 100 % realisasi sebesar Rp. 36.974.200,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau (99,93%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.25.800,- (Dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan listrik (lampu, kabel, baterai) bahan elektronik, pemeliharaan instalasi listrik maupun elektronik guna penerangan bangunan Gedung kantor.
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 137.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 136,992.950,- (Seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau (99,99%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.77.050,- (Tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya Alat Tulis Kantor untuk mendukung kegiatan kantor seperti kertas, pena, kalkulator, map dan alat tulis kantor lainnya.
- ✓ Penyediaan Peralatan rumah Tangga Rp. 53.430.000,-, (Lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 53.430.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau (100%). Hasil yang dicapai adalah tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor berupa sapu, kain pel, sabun, pewangi ruangan serta terpeliharanya lingkungan kantor untuk mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atau (100%). Hasil yang dicapai adalah tersedianya

bahan Logistik Kantor (konsumsi, makanan dan minuman) pegawai, rapat dan tamu pada kegiatan kantor.

✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah) atau (100%) Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa amplop dinas map dinas, buku disposisi.

✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 6.292.000,- (Enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau (89,89%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 708.000,- (Tujuh ratus delapan ribu rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya informasi terbaru, majalah, surat kabar, buku-buku panduan dan peraturan perundang-undangan.

✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 349.924.990,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau (99,98%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.75.010,- (Tujuh puluh lima ribu sepuluh rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

5. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terealisasi sebesar Rp. 3.874.770.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau (87,98%) dari anggaran sebesar Rp. 3.409.002.841,- (tiga milyar empat ratus sembilan juta dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Penyediaan Jasa Surat-menyurat Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) atau (100%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.0,-. Hasil yang dicapai adalah Laporan Penyediaan jasa surat-menyurat .
- ✓ Penyediaan jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.562.400.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 502.760.841,- (Lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau (89,40%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 59.639.159,- (Lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa telpon, PDAM, listrik dan internet serta tv kabel kantor selama 12 Bulan. Tersedianya laporan penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 3.295.370.000,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 2.889.242.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau (87,68%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 406.128.000,- (Empat ratus enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah). Hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa tenaga kerja/tenaga lainnya outsourcing dan Pegawai TKPD sebanyak 98 orang.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terealisasi sebesar Rp. 372.507.975,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau (96,18%) dari anggaran

sebesar Rp. 387.300.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 296.300.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 281.983.975,- (Dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau (95,17%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 14.316.025,- (Empat belas juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh lima rupiah). Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya dan beroperasinya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 selama 12 bulan dan biaya pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2 serta perizinannya.
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya sebesar Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 90.524.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau (99,48%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 524.000,- (Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah). Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya untuk kelengkapan mendukung kelancaran kerja dalam keadaan baik.

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan.

Realisasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp. 89.568.300,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau (99,52%) dari anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Target Fisik 100 % Realisasi keuangan sebesar Rp. 89.568.300,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) atau (99,52%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 431.700,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Hasil pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)**

Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) merupakan salah satu mitra dari berbagai elemen yang mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam menghadapi daya saing ekonomi nasional dan global. Kondisi saat ini LUPM yang ada yaitu Lumbung Pangan/Poktan/Gapotan perlu pembinaan dan pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan gapoktan/poktan/LUPM menjadi lebih tangguh, kuat dan mandiri dalam meningkatkan produktifitas dan produksi pangan/pertanian serta perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 ini melakukan pemantauan dan pembinaan ke Lumbung Pangan/Poktan/Gapokta di 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni kabupaten Ogan Ilir, Pali, OKU, Lahat dan Kota Pagaralam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membina agar Lumbung Pangan/Poktan/Gapoktan diharapkan terus semangat untuk bertani dan berkebun serta melakukan pembinaan aktivitas serta, membantu memecahkan problema /permasalahan yang dialami kelompok di lapangan, pemberdayaan kemitraan usaha kepada Gapoktan yang mendapatkan bantuan agar bisa mandiri dan bermitra serta mewujudkan pemberdayaan kelompok dengan membangun aspek-aspek organisasi, administrasi, permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan jaringan pemasaran.

- **Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)**

Kegiatan Gerakan pangan murah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Data rinci ada pada tabel berikut ini.

Tujuan dilaksanakannya Gerakan Pangan Murah ini adalah : (1) Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik ditingkat produsen maupun konsumen (2) Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

Vendor-vendor yang ikut serta dalam Gerakan Pangan Murah ini adalah vendor yang telah menjadi mitra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan seperti Kios Pangan KEPO, Perum Bulog Wilayah Sumsel Babel, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melalui Pasar Tani, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Dharma Wanita Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa, CV. Amirsya Abadi Jaya (Supplier daging beku), CV Mekar Abadi (Distributor Minyak, gula pasir, terigu) dan UMKM pangan lainnya.

Jenis komoditas yang dipasarkan berupa bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, cabe rawit merah, telur ayam ras, daging ayam, daging sapi/kerbau beku, aneka buah dan sayur, pangan olahan dan komoditas pangan kebutuhan masyarakat lainnya.

Harga pangan pokok strategis yang dijual dipastikan di bawah harga pasar. Selama pelaksanaan GPM antusiasme masyarakat tinggi sekali, terutama untuk komoditas pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir dan telur ayam. Dengan adanya GPM ini masyarakat sekitar lokasi merasa sangat terbantu karena mereka bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus.

Data rekapitulasi penjualan secara rinci pada Gerakan Pangan Murah ini ada pada Lampiran. Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah yang cukup strategis untuk menstabilkan harga dan pasokan komoditas pangan pokok, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Adanya GPM ini menghindarkan penumpukan konsumen pada pasar-pasar tradisional yang cenderung akan mendongkrak harga menjadi lebih mahal, karena tidak seimbang antara pasokan dan konsumen yang berburu komoditas pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk berpartisipasi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau, baik bekerjasama dengan pihak pemerintahan maupun dengan masyarakat umum lainnya, maupun dengan kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh instansi lainnya.

2. Promosi Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) atau (99,97%) realisasi sebesar Rp. 1.199.600.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Target Fisik 100 % Terealisasi sebesar Rp. 1.199.600.000,- (Satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atau (99,97%) dari anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

A. Indikator Kinerja

- a. Indikator kinerja dari Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Sub

Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah :

- ❖ Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) /B2SA goes To School
- ❖ Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
 - Tersalurkannya bantuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
 - Tersedianya sumber protein berkualitas
 - Akses yang lebih baik terhadap sumber protein hewani
 - Peningkatan kesehatan dan terpenuhinya gizi masyarakat dan membantu penurunan angka stunting.

B. Evaluasi Kinerja

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) /B2SA goes To School sudah terlaksana pada bulan Juli dan Agustus Tahun 2024 pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin dan Muara Enim. Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan Promosi B2SA Goes to School:

- 1) SD Negeri Nomor 34 Kota Lubuk Linggau pada tanggal 31 Juli 2024;
- 2) SMP Negeri Muara Beliti tanggal 01 Agustus 2024;
- 3) SMP Negeri 2 Muara Rupit tanggal 02 Agustus 2024;
- 4) SMP Negeri Karang Karang Dalo Kota Pagar Alam tanggal 8 Agustus 2024;
- 5) SD Negeri Percontohan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tanggal 13 Agustus 2024; dan
- 6) SMP Negeri 2 Kabupaten Muara Enim tanggal 22 Agustus 2024.

Sedangkan pemberian Bantuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2024 sudah dilaksanakan bulan November dan Desember Tahun 2024 pada 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kabupaten OKU dan Kabupaten OKUS. Lokasi Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2024 pada 16 (enam belas) kelompok penerima manfaat dan barang sudah diterima dengan baik dan cukup oleh setiap penerima manfaat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penerima Manfaat dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Kelompok Wanita Tani Mulya Sejahtera Bersama Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang, BAST Nomor: 935/DKPP-890/IV/2024 tanggal 28 November 2024;
- 2) Kelompok Wanita Tani Borang Indah Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, BAST Nomor: 935/DKPP-888/IV/2024 tanggal 28 November 2024;
- 3) Kelompok Tani Corps Peternak Mandiri (CPM) Wilayah Binaan Lebong Mulya Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, BAST Nomor: 935/DKPP-886/IV/2024 tanggal 28 November 2024;
- 4) Kelompok Wanita Tani Maju Bersama Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-919/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 5) Kelompok Wanita Tani Melati Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-909/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 6) Kelompok Wanita Tani Maju Jaya Desa Suka Jadi Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-905/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 7) Kelompok Wanita Tani Mawar Desa Negeri Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-907/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 8) Kelompok Wanita Tani Cahaya Daya Desa Rantau Kumpai Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-921/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 9) Kelompok Wanita Tani Cempaka Tani Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU, BAST Nomor: 915/DKPP-905/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 10) Kelompok Tani Sinar Saudara Desa Bumi Kawa Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-917/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;

- 11) Kelompok Wanita Tani Mawar Putih Desa Mekar Jaya Kecamatan Sosoh Buay Raya Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-913/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 12) Kelompok Gapoktan Mutiara Curup Dumas Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU, BAST Nomor: 935/DKPP-911/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 13) Kelompok Wanita Tani Tani Jaya Desa Negeri Batin Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKUS, BAST Nomor: 935/DKPP-897/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 14) Kelompok Wanita Tani Sri Lestari Desa Kembang Tinggi Kecamatan Buay Pemanca Kabupaten OKUS, BAST Nomor: 935/DKPP-903/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- 15) Kelompok Tani Melati Jaya Desa Bumi Jaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKUS, BAST Nomor: 935/DKPP-899/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024; dan
- 16) Kelompok Wanita Tani Rukun Tani Desa Kiwis Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS, BAST Nomor: 935/DKPP-901/IV/2024 tanggal 1 Desember 2024.

C. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. *Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota*

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 73.519.276,- (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) atau (98,03%) yang terdiri dari :

- ✓ Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 73.519.276,- (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) atau (98,03%) sisa anggaran Rp. 1.480.724,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Hasil dari beberapa kegiatan yang terdapat dalam Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2024 tersebut dapat disampaikan sebagai berikut : melalui operasional kegiatan administrasi perkantoran, koordinasi/pertemuan/ pembinaan/sosialisasi dengan instansi

lingkup ketahanan pangan kabupaten/kota, pendataan kelompok tani/pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kabupaten/kota, melakukan pembinaan kelembagaan/ pelaku usaha, melakukan survailance, melakukan inspeksi/pengawasan, melakukan Sertifikasi Prima 2 dan Prima, melakukan Registrasi/Izin Edar PSAT, melakukan penilaian lapang untuk penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT, pengambilan sampel dan uji laboratorium sampel PSAT, melaksanakan Sidang Tim Komisi Teknis Otoritas Keamanan Pangan untuk memberikan rekomendasi penerbitan Sertifikasi Prima, Registrasi/Izin Edar PSAT dan SPPB PSAT, koordinasi, konsultasi ke pusat, pertemuan tingkat nasional, dan membuat laporan akhir kegiatan.

Adapun pelaksanaan Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, diantaranya sebagai berikut:

1. Operasional Kegiatan Administrasi Perkantoran.

Menyediakan Alat Tulis Kantor, menggandakan surat-surat dinas/blanko penilaian lapang/blanko pengambilan sampel PSAT.

2. Melakukan Survailance.

Pelaksanaan survailance ke PT. Belitang Panen Raya diterima oleh Hajar Agung Tri Gunawan yang sekaligus mendampingi pelaksanaan Study Lapangan dari Dinas Pangan Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

3. Melakukan inspeksi/pengawasan.

Dalam rangka penjaminan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) upaya yang dilakukan yaitu melakukan inspeksi dan pengawasan keamanan pangan menjelang Bulan Ramadhan dan Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2024 pada pasar tradisional dan retail modern dalam Kota Palembang.

Pengawasan dilakukan oleh dua tim yaitu tim dari UPTD BPMKP Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas mengecek nomor registrasi Pangan Segar Asal

Tumbuhan (PSAT) dan tim dari Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang bertugas mengecek komoditi bawang merah dan putih dengan menggunakan *rapid test kit*.

Dalam pelaksanaan inspeksi dan pengawasan ini bersama dengan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada: 1). Pasar KM 5; 2). Diamond Soma; 3). Pasar Sako Kenten; 4). JM Lemabang; 5). Pasar KM 12; 6). JM Sukarame; 7). Pasar 26 Ilir; 8). Hypermar PIM; 9). Pasar Induk Jakabaring; 10). OPI Mall; 11). Pasar Lemabang; 12). Farmer Market PTC Mall.

4. Pengambilan sampel dan uji laboratorium sampel PSAT.

Pelaksanaan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan ke kabupaten/kota sesuai komoditi pangan segar asal tumbuhan yang diajukan oleh Dinas Kabupaten/kota atau pelaku usaha dan kemudian dari sampel pangan segar asal tumbuhan dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Biaya pengujian sampel PSAT tersebut untuk Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani/Petani dibiayai anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Pelaku Usaha yang berupa PT/CV/perusahaan/swasta membayar sendiri biaya pengujiannya.

Disamping itu juga pengambilan sampel ada beberapa Dinas Kabupaten/Kota memfasilitasi/menganggarkan biaya pengujian sampel PSAT seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Prabumulih.

5. Melaksanakan Sidang Tim Komisi Teknis Otoritas Keamanan Pangan Daerah.

Telah terbentuknya Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 521.1/SK/DKPP-085/IX/2024 tanggal 6 Februari 2024, tentang Penetapan Narasumber Sidang Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam pelaksanaan Rapat Tim Komisi Teknis (Komtek) OKPPD mempunyai tugas dan kewenangan untuk: 1). melakukan pembahasan terhadap hasil audit penilaian lapangan sebagai bahan rekomendasi keputusan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam (PSAT PD) oleh Ketua OKPPD Provinsi Sumatera Selatan. 2) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap Hasil Audit Lapang dalam rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam (PSAT PD) kepada Ketua OKPPD Provinsi Sumatera Selatan/Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Pelaksanaan Sidang Tim Komisi Teknis nantinya akan merekomendasikan/ menolak untuk diterbitkannya Sertifikasi Prima dan Registrasi/Izin Edar PSAT-PD/Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT. Pada Tahun 2024 Rapat Tim Komisi Teknis dilaksanakan sebanyak 13 kali.

1. Pada Sidang Komisi Teknis tanggal 27 Agustus 2024 permohonan registrasi SPPB pelaku usaha Perum Bulog GPP Suka Maju (Kenten) tidak diberikan rekomendasi penerbitan sertifikat SPPB PSAT karena ada temuan ketidaksesuaian belum memenuhi persyaratan teknis maka perlu dilakukan perbaikan ulang karena belum tersedianya tempat cuci tangan, kebersihan tidak terjaga. Dan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Sidangkan kembali dan hasilnya mendapat persetujuan diterbitkannya SPPB PSAT.
2. Pada Sidang Komisi Teknis tanggal 11 November 2024 ada komoditi bayam dari Kabupaten Banyuasin tidak diberikan rekomendasi untuk diterbitkan sertifikat prima 3 karena hasil uji laboratorium kandungan pestisida diatas batas maksimum cemaran.
3. Setelah itu dilakukan penilaian ulang atas perbaikan ketidaksesuaian pada tanggal 10 Oktober 2024 telah dilakukan Sidang Komisi Teknis kembali dan hasilnya lolos diberikan rekomendasi penerbitan SPPB PSAT.

6. Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Hasil pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT Tahun 2024 dari 17 kabupaten/kota sebanyak 82 (Delapan puluh) sertifikat yang diterbitkan terdiri dari : 1). Sertifikat Prima-2 tidak ada sertifikat; 2). Prima-3 sebanyak 20 (dua belas) sertifikat; 3). Sertifikat Izin Edar sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sertifikat, dan Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik-PSAT sebanyak 24 (dua puluh

7. Koordinasi, konsultasi ke pusat, pertemuan tingkat nasional.

Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Ke Badan Pangan Nasional Sub. Kegiatan Sertifikasi Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2024. Hasil konsultasi sebagai berikut :

1. Parameter pengujian yang akan dipakai dalam pengujian sampel yang sesuai dengan Permentan 53/2018 dan Perbanas 10/2024. Saran dari Ketua Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Sumatera Selatan agar adanya pengujian bakteri karena petani menggunakan pupuk kandang. Berdasarkan hasil konsultasi tetap berpedoman pada Peraturan yang ada dan jika ada bakteri yang menempel pada PSAT pada saat proses pemanasan/dimasak bakteri tersebut akan mati.
2. Dalam penulisan masa berlakunya izin edar PSAT terdapat perbedaan tanggal berakhirnya, contoh mulai dari 14 Agustus 2024 s.d 14 Agustus 2029 atau 14 Agustus 2024 s.d 13 Agustus 2029. Hasil konsultasi tidak usah dipermasalahkan. Yang penting agar disesuaikan dengan yang tertera pada sertifikat.
3. Tahun 2022 kami menerbitkan izin edar pelaku usaha Gapoktan masih secara manual sebelum adanya melalui OSS. Dan sekarang kewenangan untuk Registrasi oleh kabupaten (menengah ke bawah). Semula masih label putih

dan tahun ini akan ditingkatkan menjadi label hijau dgn anggaran pusat. Artinya pelaku usaha tersebut untuk mengajukan surat permohonan penerbitan Sertifikat melalui OSS ya.

4. Input data pada SIPSAT nomor sertifikat PSAT PD-IDN belum bisa dimasukan, sayang tidak menambah jumlah sertifikat yang sudah terbit. Hasil konsultasi dapat dientri namun dapat dibedakan sertifikat tersebut merupakan perolehan produk dinas kita.
5. Untuk peningkatan jumlah PSAT yang akan disertifikasi jaminan keamanan pangan di kabupaten kota perlu adanya regulasi/keputusan bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah adanya produk yang diedarkan memiliki sertifikat keamanan pangan.
6. Untuk memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya keamanan pangan segar asal tumbuhan maka perlu dilakukan sosialisasi, melaksanakan edukasi dan promosi, iklan2 keamanan pangan.
7. Perlunya pemahaman keamanan pangan kepada pelaku usaha/petani agar dalam usahataniya mematuhi aturan dalam pemakaian pestisida sesuai dosis yang dianjurkan.
8. Sertifikat izin edar yang memiliki nomor IDN dan telah diterbitkan oleh provinsi lain maka tetap diupload pada aplikasi SIPD karena sertifikat merupakan proses yang telah kita lakukan.
9. Pada penulisan tanggal masa berlakunya Sertifikat itu tidak masalah seandainya sama tanggal berakhirnya Sertifikat.
10. Untuk membantu pemasaran hasil pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan itu dapat dibantu tenaga APHP yang ada di lapangan. Dengan membuat rumah pengemasan dan mencantumkan logo prima dan nomor Sertifikat Prima 3.
11. Perolehan penerbitan Sertifikat/Registrasi PSAT sampai saat ini pada ranking 11 dapat dilihat aplikasi SIPSAT untuk dapat memberikan memotivasi pusat dalam pemberian mobil laboratorium keliling. Namun

untuk provinsi Sumatera Selatan belum dapat dipastikan dapat bantuan mobil tersebut karena terbatasnya jumlah pengadaan mobil laboratorium keliling tersebut disamping itu ada penilaian lain dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat.

12. Dalam penilaian Kelembagaan OKKPD kabupaten/kota agar melibatkan unsur struktur yang ada pada Kelembagaan pada UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

D. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Realisasi Urusan Pemerintah Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.777.707.447,- (99,87%) dari anggaran sebesar Rp. 6.786.812.647,- yang terdiri dari :

1. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan nTernak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- ✓ Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan Anggaran sebesar Rp. 436.584.052,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp. 432.676.900,- (Empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau (99,11%) sisa anggaran sebesar Rp. 3.907.152,- (Tiga juta sembilan ratus tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Indikator kinerja pada Sub Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak meliputi :

- Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas

Terpenuhinya bahan bakar dan pelumas untuk kegiatan operasional UPTD BP-HPT Sembawa. Pembelian bahan bakar diperuntukkan untuk kendaraan dan juga mesin-mesin operasional UPTD BP-HPT Sembawa yaitu: mobil operasional kebun, traktor, hand traktor rotary, mower, mesin air dan mesin chooper.

- Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Straw Kosong)

- Straw kosong adalah wadah untuk mengemas semen (mani) beku sapi/kambing/kerbau yang berbentuk seperti sedotan/pipet plastik dengan volume isi 0,25. Warna dari straw ini berbeda-beda disesuaikan dengan bangsa sapi. Straw Kosong sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan di UPTD BP-HPT Sembawa.



- Dalam melaksanakan kegiatan produksi semen beku yang berkualitas baik di UPTD BP-HPT Sembawa, diperlukan N2 Cair untuk membekukan dan menyimpan mani sapi.



- Belanja Obat-Obatan-Obat (Obat-Obatan Hewan)

Obat - obatan adalah bahan untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan hewan. Didalamnya juga ada yang mengandung vitamin dan bahan kimia lain

untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mempertahankan kehidupan sel spermatozoa. Sapi jantan yang prima nantinya akan menghasilkan sel spermatozoa yang di proses di laboratorium menjadi semen beku yang berkualitas.



- Belanja Natura dan Pakan – Natura dan Pakan Lainnya

Pakan ternak terdiri dari konsentrat dan kacang hijau yang berkualitas. Konsentrat digunakan untuk pakan tambahan Bull (Pejantan) dan kacang hijau digunakan untuk dibuat kecambah sebagai sumber vitamin E pada Bull.



- Belanja Jasa Kalibrasi (Kalibrasi Peralatan Laboratorium)

Kalibrasi alat laboratorium adalah proses untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengukuran dengan membandingkan alat ukur dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi dilakukan secara berkala karena tingkat akurasi alat laboratorium akan berubah seiring dengan penggunaannya.

UPTD BP-HPT Sembawa memiliki laboratorium untuk melakukan proses semen beku. Di dalam laboratorium tersebut memiliki berbagai macam alat laboratorium yang harus di kalibrasi agar dapat memastikan alat tersebut

berfungsi dengan baik dan aman, mengurangi risiko kegagalan perangkat yang bisa berakibat fatal pada proses semen beku.



- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
- UPTD BP-HPT Sembawa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan berdiri pada tahun 2001 dengan nama UPTD BIB dan Lab Keswan, selanjutnya pada tahun 2012 berubah menjadi UPTD BIB Sembawa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 7 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menjadi UPTD BP-HPT Sembawa yang didirikan di dalam area kawasan BPTU-HPT Sembawa dengan status pinjam pakai lahan (Pinjam Pakai Barang Milik Negara). Sehubungan dengan status tersebut dan lahan yang di pinjam akan digunakan oleh BPTU-HPT Sembawa maka UPTD BP-HPT Sembawa akan pindah ke lokasi lahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin seluas $\pm 126.400 \text{ M}^2$.



- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang – Pengembangan Pertanian dan Perdesaan (SNI)

Salah satu Visi dan Misi dari UPTD BP-HPT Sembawa adalah penghasil semen beku ternak unggul yang bermutu baik dan berdaya saing tinggi untuk kebutuhan Sumatera Selatan serta provinsi lain. Supaya produk semen beku yang dihasilkan UPTD BP-HPT Sembawa aman dalam penggunaannya, memberikan nilai lebih di mata konsumen karena kualitas produk terjamin dan mempunyai standar yang berlaku secara nasional maka harus dinilai dan diuji produk semen beku tersebut dengan cara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pada tahun 2021 UPTD BP-HPT Sembawa telah men-SNI kan produk semen beku dari 3 ekor bangsa Brahman, 1 ekor bangsa Bali, 1 ekor bangsa Simental dan 1 ekor bangsa Friesian Holstein (FH). Oleh karena itu pada tahun 2024 ini UPTD BP-HPT Sembawa ingin menambah produk semen beku yang disertifikasi SNI dan disertifikasi ulang SNI.



- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan Biosecurity)

Terpeliharanya biosecurity di UPTD BP-HPT Sembawa untuk membangun dan mengintegrasikan beberapa usaha perlindungan yang dapat menjaga ternak tetap sehat.



- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - ✓ Belanja perjalanan dinas luar daerah

Perjalanan dinas ini dilakukan untuk koordinasi dan konsultasi terkait pendaftaran SNI UPTD BP-HPT Sembawa, Konsultasi Standar Nasional Indonesia (SNI) ke LS-Pro, Koordinasi Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.



Perjadin ke Jakarta Dalam Rangka Konsultasi SNI ke LS-Pro tanggal 06 -09 November 2024

- ✓ Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan dinas ini dilakukan untuk monitoring penyebaran semen beku, monitoring hasil semen beku, kunjungan kerja, dll.

DATA PRODUKSI, DISTRIBUSI, STOK SEMEN BEKU

Data produksi, distribusi, stok semen beku UPTD BP-HPT Sembawa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan s/d 31 Desember 2024 :

No	Bangsa Sapi	Stok Awal Tahun	Produksi	Distribusi	Stok Akhir
1.	Brahman	12.244	6.132	7.973	10.403
	-SNI	2.695	-	-	2.695
2.	Bali	3.885	2.832	4.533	2.184
3.	Friesian Holstein	1.027	-	173	854
4.	Simental	123	-	-	123
	-Non SNI				
	Jumlah SNI	17.156	8.964	12.679	13.441
	Jumlah Non SNI	2.818	-	-	2.818
	SNI + Non SNI	19.974	8.964	12.679	16.259

Produksi semen beku mengalami penurunan pada tahun 2024 ini disebabkan sapi yang ter-SNI sebanyak 2 (dua) ekor mati karena sakit.

2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Produksi Lain

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Produksi Lain sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) atau (96,33%) realisasi sebesar Rp. 72.246.400,- (tujuh puluh dua juta dua ratus rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain Target Realisasi 100% Terealisasi sebesar Rp. 72.246.400,- (tujuh puluh dua juta dua ratus rupiah) atau (96,33%) dari anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 2.753.600,- (dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Bantuan ternak ayam yang di laksanakan memberikan banyak manfaat diantaranya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, menambah lapangan kerja, peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Diharapkan bantuan berupa ternak dan pakan tersebut dapat terus berlanjut dan berjalan yang selaras dengan program Makan Bergizi Merah Putih pada Tahun 2025.

1. Output (Keluaran)

Terdistribusinya bantuan ternak ayam sebanyak 500 ekor dan 1.750 Kg pakan ternak kepada berapa kelompok peternak di provinsi Sumatera Selatan, dengan dokumentasi dan laporan penyerahan bantuan.

2. Outcome (Hasil)

Peningkatan jumlah ternak ayam di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dengan adanya bantuan ternak ayam ini selain dapat menambah penghasilan peternak dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peternak terhadap cara beternak ayam yang baik dapat juga meningkatkan produksi pangan dan peluang kerja.

3. Input (Masukan)

Ternak ayam telah didistribusikan ke dua kelompok yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, masing masing kelompok mendapat bantuan 250 Ekor ayam dan 875 Kg pakan.

Lampiran :

Kab.	No	Kelompok	Alamat Kelompok	Pagu Anggaran		Jenis	
				Ayam (Rp)	Pakan (Rp)	Ayam (Ekor)	Pakan (Kg)
Ogan Ilir	1	Karya Tani	Desa Meranjat II Kec. Indralaya Selatan	22.500.000	7.875.000	250	875
	2	Tunas Harapan	Desa Senuro Timur Kec. Tanjung Batu	22.500.000	7.875.000	250	875
Jumlah				45.000.000	15.750.000	500	1.750

E. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Penataan Prasarana Pertanian

Penataan Prasarana Pertanian sampai 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.166.062.779,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau (99,95%) dari anggaran sebesar Rp. 1.168.628.595,- (Satu milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 2.565.816,-) yang terdiri dari :

Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian realisasi sebesar Rp. 858.685.418,- (Delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) atau (99,95%) dari anggaran sebesar Rp. 859.088.000,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 402.582,- (Empat ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Piutang tahun 2023 sudah dibayarkan di tahun 2024 ini. Tentang uraian kinerja semua terealisasi berupa belanja bahan kimia, alat tulis kantor, peralatan kandang, pakan konsentrat, hijauan pakan ternak, bibit rumput, pemeliharaan sarana/perkandangan, pembukaan lahan penanaman rumput. Namun demikian masih diperlukan lagi dana alokasi untuk pagar kawat keliling.

Sasaran Pusat Pengembangan Kerbau Rawa adalah terbangunnya Kesepahaman bersama peternak kerbau rawa dan stakeholder dalam rangka Pengembangan dan pelestarian Kerbau Rawa. Utamanya masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui hal ikhwal kerbau rawa.

Capaian Keberhasilan yang telah dicapai ditahun 2024 dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pusat Pengembangan Kerbau Rawa di Kecamatan Rambutan Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dukungan kegiatan dari lintas bidang dan fungsinya baik dukungan yang langsung mempengaruhi target capaian maupun dukungan tidak langsung berupa dukungan manajemen dan stakeholder yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Lahan, luas lahan dan jenis rumput HPT di Pusat Pengembangan Kerbau Rawa Tahun 2024

No	Lahan	Luas Lahan	Jenis Rumput	Keterangan
----	-------	------------	--------------	------------

1	Lahan 1	35 m x 17 m	Indigofera	
2	Lahan 2	41 m x 30 m	Staria	
3	Lahan 3	31 m x 16 m	Pakchong	
4	Lahan 4	120 m x 16 m	Odot	
5	Lahan 5 & 6	55 m x 30 m	Kinggrass	
6	Lahan 7	50 m x 25 m	Indigofera	
7	Lahan 7	46 m x 10 m	Kinggrass	
8	Lahan 8 & 11	111 m x 58 m	Kinggrass & Odot	
9	Lahan 9	127 m x 24 m	Kinggrass, Odot & Pakchong	
10	Lahan 10	48 m x 24 m	Indiofera & Kinggrass	
11	Lahan 12	52 m x 20 m	Odot	
12	Lahan 13		Odot	
13	Lahan 14	61 m x 8 m	Odot	
14	Lahan 15 & 16	2,2 Ha.	Odot, king gras & pakchong	
	Total	45.577 m ² (4,5 ha)		

Tabel 2. Data Populasi Kerbau Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1	Ogan Komering Ulu	1.924	1.944	3.459	1.457
2	Ogan Komering Ilir	7.727	7.735	7.437	7.464
3	Muara Enim	4.044	1460	1.473	748
4	Lahat	2.333	2341	1.378	1.285
5	Musi Rawas	706	715	725	253
6	Musi Banyuasin	950	840	835	367
7	Banyuasin	2417	2.495	2.620	979
8	Ogan Komering Ulu Selatan	285	293	215	19
9	Ogan Komering Ulu Timur	1.727	1.229	895	487
10	Ogal Ilir	2852	2.910	2.469	1.624
11	Empat Lawang	836	936	948	426
12	Kota Palembang	-	-	-	15

13	Kota Prabumulih	10	6	5	21
14	Kota Pagaralam	180	259	187	43
15	Kota Lubuk Linggau	102	91	50	40
16	Musi Rawas Utara	3.317	3.367	4.911	2.852
17	Penukal Abab Lematang Ilir	531	540	31	28
	TOTAL	29.941	27.161	27.638	15.210

Sumber : Subbag Perencanaan DKPP Sum-Sel.

Tabel 3. Data Penimbangan Kerbau Rawa di SBC

No	No Ear Tag	Ciri-Ciri Ternak	Berat Badan (Kg)	
			September	November
1	091	Kerbau jantan valen	125	152
2	071	Tanduk rongkop sebelah	358	340
3	072	Induk valen	372	356
4	073	Rongkop keguguran	347	350
5	074	Belang betina	295	275
6	075	Tanduk tegak	415	415
7	076	Rongkop besak	425	410
8	077	Kerbau pocot	282	294
9	078	Kerbau kesit	436	410
10	080	Kerbau merah	306	328
11	081	Kerbau penelitian B	272	276
12	089	Kerbau jantan besak	345	395
13	090	Kerbau jantan kecil	119	290
14	082	Kerbau baru tanduk cat	138	134

Permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di Pusat Pengembangan Kerbau Rawa Tahun 2024 :

1. Pagar kawat Keliling permanen yang belum semuanya Terpasang
2. Lampu Jalan yang banyak Mati dan CCTV rusak
3. Lahan rumput yang masih Belum diolah/ditanami
4. Pipa air masih Banyak yang Bocor dan parit tidak lancar.
5. Kapasitas hasil panen dan padang penggembalaan belum mencukupi
6. Banyak Selokan Yang Airnya Tidak Mengalir

- ✓ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri atau tempat Pelayanan Paramedik Veteriner Keswan Realisasi sebesar Rp. 309.377.361,- (Tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau (99,95%) dari Anggaran Rp. 309.540.595,- (Tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan anggaran sebesar Rp. 163.234,- (Seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Capaian indikator kinerja Kegiatan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2024 jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Kesayangan/Ternak 2.827 tindakan atau sebesar 94,23 % dari target 3.000 tindakan yang ditetapkan untuk tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu 3.517 tindakan terjadi penurunan sebanyak 690 tindakan atau 80,38 %. Hal ini disebabkan banyaknya pasien yang tidak bisa ditangani oleh tenaga medis yang hanya 2 (dua) orang dan kadang dibantu oleh Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan dan juga Kepala Seksi Penunjang Medik Veteriner UPTD Rumah Sakit Hewan. Pada triwulan keempat tenaga medisnya berkurang satu sehingga yang aktif melayani hanya 1 orang saja walau kadang masih tetap dibantu oleh Kepala UPTD dan Kepala Seksinya.

Semakin banyak yang tahu keberadaan UPTD Rumah Sakit hewan sebagai sarana kesehatan hewan kesayangan, UPTD Rumah Sakit Hewan juga melakukan promosi di

beberapa aplikasi sosial media diantaranya melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, instagram Rumah Sakit Hewan, Whatsapp dan juga ikut melaksanakan kegiatan Hari Rabies Sedunia (WRD) yang bekerjasama dengan PDHI, pecinta hewan kesayangan, pengusaha, klinik hewan. Ikut berpartisipasi juga dalam kegiatan GSMP di Kabupaten OKI. Juga promosi ke Kabupaten/Kota yang mempunyai Pusat Kesehatan Hewan dengan memberikan pelayanan Kesehatan.

F. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. *Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi*

Realisasi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau sebesar (99,29%) dari anggaran sebesar Rp. 49.645.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Target Fisik 100 % realisasi sebesar Rp. 49.645.500,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau (99,29%) dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tahun 2024 adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan dan menanggulangi penyakit hewan menular yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Adapun capaian indikator kinerja adalah persentase penurunan penyakit ternak. Tahun 2024 kejadian penyakit hewan (yang dilaporkan) sebanyak **1.720** kasus, laporan ini mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 58 kasus laporan penyakit yang terlapor di iSIKHNAS. Kejadian

penyakit yang dimaksud merupakan penyakit infeksius, sehingga persebaran kejadian penyakit terjadi dalam jumlah masif dan dalam waktu singkat.

Peningkatan kejadian ini merupakan salah satu parameter diperlukannya program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan yang memadai. Penyusunan program pencegahan dan pengendalian untuk penyakit hewan menular didasarkan pada risiko tertularnya populasi rentan di wilayah dan munculnya kembali (*relapse*) kejadian penyakit di wilayah tersebut. Tidak kalah penting adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penanggulangan penyakit hewan. Sumber dana yang tersedia telah dialokasikan untuk pengadaan obat suportif dalam pencegahan dasar penyakit hewan, utamanya pada ternak, yakni dengan pemberian anthelmentik dan sediaan untuk pengendalian vektor penyakit hewan menular.

Adapun rincian laporan penyakit hewan di wilayah Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Lumpy Skin Disease (LSD)

Lumpy Skin Disease (LSD) atau penyakit kulit berbenjol yang menyerang ternak, sapi dan kerbau dan dapat menular melalui vektor seperti lalat atau nyamuk, dan menyebabkan kerugian ekonomi pada komoditas ternak. Penyakit LSD menjadi salah satu penyakit hewan menular yang diprioritaskan penanggulangannya di wilayah Sumatera Selatan, mengingat Tahun 2023 beberapa wilayah Sumatera Selatan melaporkan kejadian LSD pada ternak sapi.

Pencegahan dan pengendalian yang dilakukan dengan sumber daya yang ada adalah dengan menyediakan sediaan untuk mengendalikan keberadaan vektor di kandang dan mencegah penularan penyakit yang telah didistribusikan ke 17 kabupaten /kota (tabel 1).

Rabies

Salah satu dari Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayah Sumatera Selatan yang penting untuk ditanggulangi adalah rabies. Rabies merupakan penyakit virus

yang dapat menular antara hewan ke manusia (zoonosis). Hewan Penular Rabies (HPR) utama adalah anjing, kucing, kera.

Pada tahun 2024, data *causalty* akibat rabies adalah sebagai berikut:

- a. Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR),
- b. Kematian pada manusia di Kabupaten Empat Lawang sebanyak 2 orang, Muaraenim 1 orang, dan Lahat 1 orang.
- c. Konfirmasi temuan laboratorium positif rabies di wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Selatan.

Terbatasnya anggaran dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit pada tahun 2024, menyebabkan terhambatnya program vaksinasi pada HPR yang perlu dilaksanakan secara masif pada HPR tiap tahun. Dengan total **populasi HPR di Sumatera Selatan 204.798 ekor**, prioritas vaksinasi rabies pada anjing sesuai guideline WOAHA adalah dengan eliminasi penularan rabies pada manusia dari anjing (*Global Elimination of Dog-Mediated Human Rabies*) setidaknya **sebanyak 70% populasi HPR memiliki antibodi protektif** yang berasal dari vaksinasi rabies pada HPR.

Septicaemia Epizootica (SE)

Septicaemia Epizootica (SE) atau lebih dikenal sebagai penyakit ngorok adalah penyakit yang menyerang hewan sapi atau kerbau, bersifat akut dengan mempunyai tingkat kematian yang tinggi. Tahun 2024, muncul peningkatan kasus SE utamanya pada kerbau. Salah satu plasma nutfah yang dimiliki oleh Sumatera Selatan adalah Kerbau Rawa Pampangan. Penyakit SE memiliki tingkat kematian (*mortality rate*) dan tingkat kesakitan (*morbidity rate*) yang tinggi, utamanya pada hewan di wilayah yang belum pernah terpapar atau dilaksanakan program vaksinasi SE. Berdasarkan iSIKHNAS, di tahun 2024 setidaknya tercatat **1.726 kasus** yang tersebar di wilayah Ogan Komering Ilir (1.540 ekor/89.22%), Empat Lawang (159 ekor/9.21%), Musi Rawas Utara (20 ekor/1.16%), Banyuasin (4 ekor/0.23%), dan Ogan Ilir (3 ekor/ 0.17%). Per Desember 2024, terdapat laporan dari Kabupaten Lahat untuk *suspect*. kasus SE pada ternak kerbau dan sapi.

Program vaksinasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang paling efektif yang dapat diambil dalam mencegah merebaknya penyakit infeksius. Mengingat dampak kerugian langsung dari kematian hewan yang terinfeksi, penurunan produktifitas peternakan, dan ancaman untuk potensi plasma nutfah wilayah Sumatera Selatan, diperlukan setidaknya program vaksinasi SE berkala pada hewan rentan di wilayah Sumatera Selatan, utamanya untuk kerbau dan sapi.

Jembrana

Kasus jembrana pada sapi bali masih dilaporkan di Kabupaten Ogan Ilir. Populasi rentan di wilayah Ogan Ilir dan wilayah dengan populasi padat ternak sapi bali perlu dilakukan vaksinasi Jembrana.

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

Realisasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar (100%) dari anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pengawasan Peredaran Produk Hewan Target Fisik 100 % realisasi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar (100%) dari anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Dari Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut ini :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Belanja Barang Bahan (Pembelian alat tulis kantor, test kit, pisau kurban, id card, sarung tangan kurban, bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat).

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, digunakan untuk :

Melakukan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner NKV untuk unit usaha bidang Ritel, Cold storage, Gudang kering, Gudang berpendingin, RPH Unggas, Budidaya unggas petelur, Usaha pengolahan Produk Pangan Asal Hewan, Usaha Pengumpulan Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi, Usaha Pengolahan Daging, Usaha Rumah Walet.

Kegiatan pengawasan kesmavet dan pembinaan teknis kesmavet untuk Audit NU, Surveilans NU dan Pembinaan NKV di 8 Kabupaten/Kota (Kota Palembang, Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih).

Pelaksanaan Kegiatan Audit NKV pada Unit Usaha Prodük Hewan telah terbit Sertifikasi NWnya ada 24 unit usaha, Surveilans NKV dilaksanakan pada 18 unit usaha dan Pembinaan NKV dilaksanakan 2 unit usaha.

Luar Daerah, digunakan untuk :

Hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Laporan akhir seluruh pelaksanaan kegiatan.

Perjalanan Dinas dalam rangka Pertemuan Bimtek Auditor NKV dan Pertemuan Koordinasi Kesejahteraan Hewan Nasional 2024.

PERTEMUAN SOSIALISASI SERTIFIKASI JURU SEMBELIH HALAL

Alasan Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal (JULEHA) tanggal 5 Juni 2024 dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada juru sembelih halal tentang prosedur, etika dan pentingnya penyembelihan hewan sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Berikut merupakan alasan-alasan mengapa Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal dilakukan :

1. Melalui Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal, para juru sembelih akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata cara penyembelihan yang benar sesuai dengan prjnsip halal. Hal ini membantu meningkatkan 'kualitas proses penyembelihan dan memastikan kehalalan produk daging yang dihasilkan yaitu ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
2. Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal, bertujuan untuk memastikan bahwa juru sembelih memahami dan mematuhi ajaran agama terkait dengan proses penyembelihan hewan. Hal ini penting dalam memastikan kehalalan dan kebersihan produk daging yang dihasilkan.

3. Dengan adanya Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal, konsumen akan mendapatkan jaminan bahwa proses penyembelihan hewan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar halal. Hal ini memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terhadap produk daging yang dijual di pasaran.
4. Melalui Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal, akan diberikan pembekalan terkait etika, tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini membantu meningkatkan kualitas kerja para juru sembelih dan memastikan bahwa proses penyembelihan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
5. Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal juga mencakup aspek kebersihan dan kesehatan dalam proses penyembelihan hewan. Para juru sembelih diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam proses penyembelihan guna mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas daging yang dihasilkan.
6. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan secara teknis bagi pelaku usaha sektor hulu penghasil daging dalam melaksanakan sertifikasi halal.
 - Sarana yang diperlukan di tempat penanganan daging yakni harus ada tempat gantung, meja stainless, alat potong tulang.
 - Petugas harus bermasker : penanganan karkas dan daging harus dilakukan dalam ruangan, peralatan, wadah, dan petugas yang berbeda dari penanganan jeroan, potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan, pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan.
 - Tempat penurunan sapi harus dari tumpukan tanah atau pasir.
 - Ternak hendaknya direbahkandengan tidak membantingnya dengan menggunakan tali yang panjangnya minimal 15 meter dan tidak terbuat dari bahan plastic / nylon.
 - Penyembelih merupakan tim yang bersifat kolektif terdiri atas panitia penyelenggara, juru sembelih halal, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan.

- Juru sembelih harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara penyembelihan hewan yang halal dan higienis, serta telah mendapat pelatihan juru sembelih hewan kurban dari instansi yang berwenang.

Daging :

- Pisahkan jeroan merah dan jeroan hijau o Jeroan merah: paru, jantung, hati, limpa, ginjal o Jeroan hijau: perut, usus
- Jeroan hijau dicuci bersih; air buangnya jangan disalurkan ke selokan/sungai, buang ke septic tank atau lubang.
- Daging dihindari terkena isi jeroan, kotoran, tanah, dan benda-benda kotor.

sebelum menangani daging. Proses pemotongan mulai dari sembelih sampai pemisahan daging tidak terlalu lama. Jangan tumpuk hewan yang telah disembelih tetapi belum dipisahkan kulit dan dikeluarkan jeroannya pada tempat yang panas akan terjadi pembusukan daging/karkas.

Organisasi Juleha Sumatera Selatan Materi Sembelih Halal dan Manajemen Kurban, Hewan Kurban : Sehat Tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga; tidak kurus; berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan cukup umur.

Juru Sembelih Halal : Beragama Islam, Jika nonmuslim bukan disebut kurban, Berakal, Baligh Mumayyiz, Memiliki keahlian dalam penyembelihan; (lebih utama yang sudah sertifikasi), Memahami bta cara penyembelihan secara syar'i.

Perikehewan Pisau yang tajam hingga tidak menyakiti hewan, tidak memperlihatkan pisau/alat pemotong kepada hewan kurban, tidak terlihat antara hewan yang disembelih dengan hewan yang akan disembelih berikutnya. Cara Penyembelihan Hewan:

Hewan:

Nahr : Menyembelih hewan qurban adalah dengan menyayat pangkal leher atau Nahr. (untuk unta), Dzabh. Menyembelih dengan menyayat ujung leher. (Untuk sapi, kerbau, kambing, ayam). Hewan dirobohkan pada bagian kiri dengan posisi kepala menghadap kiblat, dengan teknik tertentu dan tidak melukai fisik kurban, Membaca basmalah ketika akan menyembelih hewan. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu:

- a. Saluran pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotis kanan dan kiri/wadajain),
- b. Saluran pernafasan (trachea/hulqum), dan
- c. Saluran makanan (oesophagus/mari')

Proses selanjutnya dilakukan setelah hewan benar-benar mati, hewan yang telah disembelih digantung dengan posisi kepala di bawah dan kaki belakang diikat ke atas agar pengeluaran darah dapat berlangsung sempurna, mencegah terjadinya kontaminasi siding dan memudahkan penanganan, saluran makanan dan anus diikat, agar isi lambung dan usus tidak mencemari daging.

Sosialisasi ini bertujuan yakni; 1) Mempromosikan sembelihan sesuai syariat Islam. 2) Mengembangkan Juru Sembelih Halal di Indonesia dan dunia. 3) Menyejahterakan anggotaanggota JULEHA melalui usaha produktif guna tercapainya masyarakat adil dan Makmur. 4) Menggalang persatuan dan Kesatuan sesama peternak dan pengusaha serta para juru sembelih halal. 5) Mencetak Juru Sembelih Halal yang bersertifikat resmi.

Sosialisasi ini memiliki manfaat yaitu penerima manfaat dapat memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi juru sembelih hewan ruminansia dan unggas di Kota Palembang agar dalam melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan syariah Islam, Kaidah Kesmavet, dan Kesrawan. Dapat mengubah pola pikir dan pandangan masyarakat umum tentang penyelenggaraan pemotongan hewan dari cara yang tradisional menjadj higienis sehingga menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), serta melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, memberikan rasa nyaman, keamanan dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat.

Output dari kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Hala! ini antara lain sebagai berikut :

- a. Dapat membantu juru sembelih halal untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang diperlukan.
- b. Melalui sosialisasi, juru sembelih halal diberikan kesempatan untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang penting dalam proses penyembelihan hewan halal.

- c. Sertifikasi ini dapat meningkatkan kualitas proses penyembelihan hewan halal yang dilakukan oleh para juru sembelih.

Sedangkan Outcome dari kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sertifikasi juru sembelih halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk daging yang mereka konsumsi, sehingga memberikan keyakinan bahwa proses penyembelihan sesuai dengan tuntunan agama Islam.
- b. Dengan sosialisasi ini, juru sembelih halal diharapkan dapat mematuhi ajaran agama Islam dalam proses penyembelihan hewan, terutama dalam hal niat yang suci.
- c. Melalui sertifikasi ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas keseluruhan industri daging halal, karena proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan standar dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

Realisasi Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 99.115.000,- (Sembilan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar (99,12%) dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Target Fisik 100 % realisasi sebesar Rp. 99.115.000,- (Sembilan puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) atau sebesar (99,12%) dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Terlaksananya Pengujian di Laboratorium Veteriner dan Kesmavet
2. Penambahan Prasarana dalam menunjang Surveillance di Laboratorium

3. Tercapainya Surveillance pada Laboratorium Veteriner dan Kesmavet

G. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian

Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian sampai 31 Desember 2024 realisasi sebesar Rp. 4.756.350.615,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) atau (99,99%) dari anggaran sebesar Rp. 4.756.600,000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Target Fisik 100 % realisasi sebesar Rp. 4.756.350.615,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) atau (99,99%) dari anggaran sebesar Rp. 4.756.600,000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

-	Observasi wilayah tugas di Dinas Kab/Kota masing-masing sesuai dengan penempatan.
-	Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem pada Hari Raya Idul Adha sesuai dengan wilayah kerja masing-masing dengan melibatkan pedagang hewan qurban pada saat penyembelihan.
-	Mampu meningkatkan perekonomian provinsi sumatera selatan sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi komoditi sektor peternakan.
-	Dapat mendukung program gerakan Sumsel Mandiri Pangan untuk mengubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penghasil.
-	Adanya kegiatan seleksi penambahan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan (PPTPPP).
-	Adanya kegiatan pelatihan dan evaluasi bagi Tenaga Pendamping Petugas

	Teknis Peningkatan Produksi Peternakan (PPTPPP).
-	Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di poskeswan.
-	Pendataan ternak by name by address di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan akan terus dilanjutkan sampai tahun 2024.
-	Pelayanan IB, PKB dan kelahiran pada hewan ternak
-	Pelaksanaan Vaksinasi rabies dan PMK
-	Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada petani/masyarakat khususnya tentang pengendalian penyakit hewan.
-	Mendampingi Tim Dinas memberikan bantuan berupa ayam KUB dan sapi ke kelompok penerima manfaat
-	Pelaksanaan kontes ternak
-	kegiatan Pertemuan mingguan di BPP

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Pengembangan Kapasita Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan sampai 31 Desember 2024 realisasi sebesar Rp. 124.610.753,- (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau (99,69%) dari anggaran sebesar Rp. 125.000,000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :

- ✓ Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Peteni Target Fisik 100 % realisasi sebesar Rp. 124.610.753,- (Seratus dua puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau (99,69%) dari anggaran sebesar Rp. 125.000,000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah). Dari Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut ini :

A. Tujuan

Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan dengan sub kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pembinaan petani-nelayan dalam usaha memajukan usaha tani dibidang pertanian, perkebunanm kehutanan, perikanan dan kelautan.
2. Meningkatkan peran Kelompok KTNA dalam bidang pertanian sebagai mitra pemerintah dalam penyuluhan pertanian
3. Sebagai pengelola Pusat Penyuluhan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)
4. Meningkatkan fungsi Kelompok KTNA yang merupakan wahana untuk memperkuat kerjasama sesama petani-nelayan dalam kelompok dan antara kelompok dengan pihak lain, untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam mengembangkan usahanya.
5. Memudahkan kerja pemerintah dalam membina dan mengembagkan usaha tani-nelayan bersama dengan kelembagaan kontak tani-nelayan yang memiliki kedudukan hukum yang pasti diharapkan memudahkan pelaksanaan Sapta Peran Kontak tani-nelayan, yakni sebagai pelindung, pembela serta pejuang hak-hak kaum tani-nelayan beserta keluarganya.
6. Terbinanya kelembagaan kelompok KTNA kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
7. Terfasilitasinya kelompok KTNA kabupaten/kota dalam mengikuti kegiatan KTNA di provinsi Sumatera Selatan.
8. Meningkatkan kualitas SDM kelembagaan petani pada umumnya dan SDM kelompok KTNA di Sumatera Selatan pada khususnya.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan dengan sub kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani adalah sebagai berikut :

1. Kelompok KTNA kabupaten/kota se-Sumatera Selatan
2. Pendamping dan Peserta kegiatan PEDTA, PENAS, Rembug Utama, HUT dan Expo KTNA Nasional provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

1. Hasil Kegiatan

Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Rembug Paripurna KTNA Kabupaten/Kota Tahun 2024 berupa Rembug-Rembug KTNA Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional :

a. Rembug Madya Terbatas Kegiatan KTNA Provinsi Sumatera Selatan.

Rembug Madya Terbatas Kegiatan KTNA Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, yang dilaksanakan di kediaman Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan Bapak HM. Basyir DA, di Jalan Bumi Mas Indah, Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Rembug Madya Terbatas diikuti oleh pengurus KTNA provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 15 orang, perwakilan dari Panitera Tetap Mimbar Sarasehan KTNA Provinsi Sumatera Selatan dan Pengurus Inti KTNA Provinsi Sumatera Selatan.

- ❖ Rembug Madya Terbatas dipimpin oleh Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan Bapak HM. Basyir DA yang diikuti oleh beberapa pengurus inti KTNA Provinsi Sumatera Selatan, rembug juga diikuti oleh Panitera Mimbar Sarasehan KTNA Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Rembug dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 dimulai pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai.
- ❖ Hasil Rembug Madya Terbatas adalah sebagai berikut :

1. Ketua Harian KTNA Prov. Sumsel

- Kepesertaan PEDDA dan PENAS dari Kabupaten/Kota yaitu 70% Petani Nelayan dan 30% Pendamping dan Peninjau.

Seragam peserta PEDDA untuk segera disiapkan

- Jadwal acara pembukaan untuk dikoordinasikan dengan Gubernur
- Untuk membuat roundow acara

2. Hj. Maryati Ridho

- SK Panitia PEDTA 4 Lawang dari Gubernur Sumatera Selatan akan dirancang setelah semua sudah terbentuk akan dibagikan kepada para panitia pelaksana
- Jadwal dan Rounddown acara masih dalam tahap proses pemantapan sambil menunggu pelaksanaan Rembug Madya dan persiapan dari tuan rumah pedta ke XVI mendatang.
- Sampai saat ini Kabupaten/Kota belum menyampaikan jumlah peserta PEDTA mengingat pelaksanaan PEDTA di laksanakan pada tahun depan.
- Pada bulan Februari 2025 setelah pelantikan Gubernur Sumatera Selatan terpilih direncanakan akan dilaksanakan Rembug Madya KTNA Provinsi yang akan dilaksanakan Palembang, guna pembahasan rapat persiapan dan pemantapan pelaksanaan PEDTA ke XVI di Kabupaten 4 Lawang.
- Pedta pelaksanaan kegiatan PEDTA dan PENAS akan mengikutsertakan tokoh lama KTNA yaitu : Hj. Marsinah, Hj. Surnayati dan H. Sineng
- Pada tahun 2024 ini akan dilaksanakan HUT, Expo KTNA Nasional di Provinsi Kota Tabanan Provinsi Bali.
- Pedum, Juklak dan Juknis PEDTA akan dibagikan pada saat pertemuan Rembug Madya KTNA telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan.
- Mulai tahun 2023 biaya perjalanan dinas akan ditransfer kepada masing2 rekening, dan segala sesuatu berkenaan dengan hal tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Pengurus KTNA Provinsi dan Panitia Provinsi.

3. HM. Basyir DA

- Sukseskan pelaksanaan Muswil P3Si dan Rembug Paripurna Petani Muda KTNA
- Harus terus kompak dan bersatu untuk sukseskan kegiatan PEDTA ke XVI

- PEDUM, JUKLAK dan JUKNIS harus segera dibagikan kepada setiap kabupaten/kota.

4. Sukardi, SP.,M.Si

- Peserta Utama PEDDA dan PENAS harus petani
- Koordinasi yang baik penggunaan dana pemerintah yang dianggarkan untuk kegiatan PEDDA dan PENAS (KTNA)
- Akan dilaksanakan pertemuan antara KTNA provinsi (bendahara dll) dengan Panitia Provinsi untuk membahas tentang anggaran dan penggunaannya lebih lanjut. dan disiapkan waktu pada saat Rembug Madya KTNA di Palembang

5. Dokumentasi



Gambar 1. Rembug Madya Terbatas KTNA Provinsi Sumatera Selatan

b. Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan Kab. Muara Enim

Waktu dan Tempat

Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan dilaksanakan di Aula Pertemuan Balai Agung Serasan Sekundang Rumah Dinas Bupati Kab Muara Enim, pada hari Jum,at tanggal 8 Maret 2024 .

1. Peserta

Peserta kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan diikuti oleh seluruh pengurus KTNA dari 17 kab/kota, Panitera Tetap Mimbar Sarasehan KTNA 17 Kab/kota dan OPD lingkup pertanian provinsi. Peserta kegiatan rembug paripurna Wanita Tani Nelayan KTNA Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh seluruh perwakilan KTNA dari 17 kab/kota se-Sumatera selatan.

2. Hasil Pelantikan

Hasil Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan, sebagai berikut :

- ❖ Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan dibuka secara langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Muara Enim Bapak DR. H. Ahmad Rizali, MA, dilanjutkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan selaku Panitera Tetap Mimbar Sarasehan KTNA Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ir. Ruzuan Efendi, MM.
- ❖ Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dihadiri secara langsung oleh Ketua KTNA Provinsi Sumatera Selatan Bapak HM. Basyir DA beserta jajaran pengurus KTNA Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Hasil keputusan Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan, sebagai berikut :
 - Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Ibu Hj. Syamsiah yang merupakan Panitera Tetap Mimbar Sarasehan KTNA Kabupaten Muara Enim, disampaikan oleh Ibu Syamsiah bahwa akan dikukuhkan dan dilantik yang terdiri dari pengurus KTNA, Pengurus Pemuda Tani Nelayan serta Pengurus KTNA Kabupaten Muara Enim
 - Pembacaan Surat Keputusan KTNA Kab. Muara Enim oleh Wakil Sekretaris KTNA Provinsi Sumatera Selatan Ibu Hj. Maryati Ridho
 - Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan serta Penandatanganan Naskah dilakukan oleh Bapak Bupati Kab. Muara Enim yang disaksikan

oleh oleh Ketua KTNA Prov. Sumsel, Ketua Wanita Tani Nelayan Prov Sumsel dan Pengurus Pemuda Tani Nelayan Provinsi Sumatera Selatan.

- Sambutan Panitera Tetap Mimbar Sarasehan KTNA Provinsi Sumatera Selatan oleh Bapak Ir. Ruzuan Efendi, MM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan oleh beliau bahwa pelantikan ini menjadi momen yang penting dalam perjalanan kepemimpinan KTNA, Pemuda Tani dan Wanita Tani Nelayan Kab Muara Enim, beliau menyadari tanggung jawab yang diemban oleh pengurus organisasi petani sangatlah vital dalam mewujudkan kemajuan dan perkembangan bidang pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumentasi Rembug



Gambar 2. Dokumentasi Pelantikan dan Pengukuhan KTNA Pemuda Tani Nelayan dan Wanita Tani Nelayan

C. Rembug Utama KTNA Nasional Pelaksanaan HUT dan Expo KTNA Nasional

1) Waktu dan Tempat

Kegiatan Rembug Utama KTNA Nasional dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2024 jam 13.30 -17.00 WITA bertempat di Tanah Lot Tabanan Provinsi Denpasar Bali dalam rangkaian acara Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional.

2) Peserta

Dihadiri oleh Pengurus KTNA Nasional dan Ketua KTNA Provinsi SeIndonesia, KTNA Nasional, Pengurus KTNA Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

3) Hasil Rembug

telah dilaksanakan pemaparan materi progress kesiapan calon tuan rumah penyelenggara PENAS XVII Tahun 2026 dan calon tuan rumah Rembug Utama dan Expo KTNA Tahun 2025, telah disepakati dan diputuskan sebagai berikut :

- ❖ Pekan Nasional (PENAS) Pertemuan KTNA, Pelaku Usaha Pertanian dan Nelayan Se-Indonesia ke XVII Tahun 2026, direncanakan pelaksanaannya bulan Juni 2026 di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- ❖ Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional Tahun 2025, direncanakan bertepatan pada hari jadi KTNA ke-54 pada bulan September 2025 di Provinsi Kalimantan Timur.
- ❖ Pelaksanaan PEDTA KTNA Provinsi Sumatera Selatan ke-XVI direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten 4 Lawang pada Bulan November 2025, sambil menunggu hasil Rembug Persiapan dan Pemantapan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 oleh Pemkab 4 Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Penetapan Tanggal PENAS XVII di Provinsi Gorontalo dan Rembug Utama dan Expo KTNA Nasional di provinsi Kalimantan Timur, akan ditetapkan dikemudian hari.
- ❖ Keputusan ini sebagai bahan untuk mempersiapkan masing-masing Provinsi sebagai tuan rumah dan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) semua tingkatan se-Indonesia untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut.

D. Rembug Utama, HUT dan Expo KTNA Nasional.

1) Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan petani yang bernaung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di sektor pertanian dalam program pembangunan nasional dan daerah, Kontak petani sebagai pelaku utama dituntut untuk mengembangkan usaha tani yang produkti, menguntungkan dan mandiri serta bermanfaat bagi petani secara keseluruhan. Oleh sebab itu diperlukan Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Kreatif dan berwawasan Global. Kontak tani diharapkan mampu membangun para usaha tani yang berdaya saing tinggi, mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan Petani melalui sub kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani (KTNA) yang difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan keikutsertaan kegiatan KTNA Nasional lembaga petani KTNA berkesempatan untuk saling mengisi dalam memperkuat kepemimpinan agribisnis ditingkat petani nelayan sekaligus mengawal pemerintahan agar mampu mengubah petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian, sehingga berpengaruh terhadap usaha agribisnis Kontak tani di Sumatera Selatan untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil pembangunan pertanian yang diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan.

Kehadiran tokoh-tokoh petani nelayan, kontak tani nelayan, dan petani nelayan yang berhasil, merupakan kesempatan yang berharga untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mereka diharapkan dapat memberi motivasi kepada petani nelayan lainnya untuk saling berinteraksi dan bersinergi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Untuk itu perlu diadakan kegiatan peragaan, unjuk tangkas dan asah terampil guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka perbaikan mutu produksi pertanian dan peningkatan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani nelayan.

Dari latar belakang tersebut, KTNA Kabupaten Sumatera Selatan akan mengikuti kegiatan Rembug Utama, HUT dan Expo KTNA Nasional dengan lokasi kegiatan di Jakarta dan Kabupaten Lembak Provinsi Banten.

2) Sasaran

Tujuan mengikuti kegiatan Expo, HUT dan Rembug Utama KTNA Nasional adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Meningkatkan motivasi petani nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis dalam sistem pembangunan dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan serta menumbuhkembangkan minat generasi muda pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan wilayah baik secara provinsi maupun Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

b. Tujuan Khusus

- Sukses substansi (alih pengetahuan, Teknologi dan Informasi)
- Sukses penyelenggaraan (dapat mengikuti kegiatan dengan baik)
- Sukses prestasi (prestasi dalam Expo, HUT dan Rembug Utama KTNA Nasional).

3) Manfaat

Manfaat kegiatan Expo, HUT dan Rembug Utama KTNA Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong kelembagaan petani KTNA untuk mengembangkan Kontak tani berusaha tani berbasis agribisnis dengan skala ekonomi yang menguntungkan di daerahnya masing-masing;
- b. Meningkatkan peran serta kelembagaan KTNA dalam membina Kontak tani di wilayahnya.
- c. Dokumentasi



Koordinasi Terkait Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) ke-XVI KTNA Provinsi Sumatera Selatan.

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan petani yang bernaung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) di sektor pertanian dalam program pembangunan nasional dan daerah, Kontak petani sebagai pelaku utama dituntut untuk mengembangkan usaha tani yang produktif, menguntungkan dan mandiri serta bermanfaat bagi petani secara keseluruhan. Oleh sebab itu diperlukan Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Kreatif dan berwawasan Global. Kontak tani diharapkan mampu membangun para usaha tani yang berdaya saing tinggi, mampu berperan dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan Petani melalui sub kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani (KTNA) yang direncanakan pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) ke-XVI di Kabupaten 4 Lawang Tahun 2025 lembaga petani KTNA berkesempatan untuk saling mengisi dalam memperkuat kepemimpinan agribisnis ditingkat petani nelayan sekaligus mengawal pemerintahan agar mampu mengubah petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian, sehingga berpengaruh terhadap usaha agribisnis Kontak tani di Sumatera Selatan untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, apresiasi, kemitraan dan promosi hasil pembangunan pertanian yang diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan.

Kehadiran tokoh-tokoh petani nelayan, kontak tani nelayan, dan petani nelayan yang berhasil, merupakan kesempatan yang berharga untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mereka diharapkan dapat memberi motivasi kepada petani nelayan lainnya untuk saling berinteraksi dan bersinergi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Untuk itu perlu diadakan kegiatan peragaan, unjuk tangkas dan asah terampil guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka perbaikan mutu produksi pertanian dan peningkatan pendapatan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani nelayan.

Dari latar belakang tersebut, KTNA Kabupaten Sumatera Selatan akan melaksanakan pembinaan dan kegiatan Pekan Daerah (PEDA) Kelembagaan Kontak Tani (KTNA) ke-XVI pada tahun 2025 dengan lokasi kegiatan di Kabupaten 4 Lawang.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pekan Daerah (PEDA) XVI KTNA Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Umum

Meningkatkan motivasi petani nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis dalam sistem pembangunan dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan serta menumbuhkembangkan minat generasi muda pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan wilayah baik secara provinsi maupun Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

2. Tujuan Khusus

- Sukses substansi (alih pengetahuan, Teknologi dan Informasi)
- Sukses penyelenggaraan (dapat mengikuti kegiatan dengan baik.
- Sukses prestasi (prestasi dalam PEDTA Petani Nelayan XVI) di Kabupaten 4 Lawang.

3. Manfaat

Manfaat kegiatan Pekan Daerah (PEDTA) XVI KTNA provinsi Sumatera Selatan adalah:

- 1) Mendorong kelembagaan petani KTNA untuk mengembangkan Kontak tani berusaha tani berbasis agribisnis dengan skala ekonomi yang menguntungkan di daerahnya masing-masing;
- 2) Meningkatkan peran serta kelembagaan KTNA dalam membina Kontak tani di wilayahnya.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan peningkatan kemampuan kelembagaan petani KTNA melalui kegiatan Pekan Daerah (PEDTA) XVI KTNA Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan bagi petani dan KTNA kabupaten/kota se Sumatera Selatan dalam meningkatkan *Soft Skill* bidang pertanian, perikanan dan peternakan melalui apresiasi pelaku agribisnis.
- 2) Mengaktualisasikan diri dalam kepemimpinan dan kemandirian kontak tani nelayan sebagai agen dan pelaku pembangunan pertanian.

- 3) Pemahaman nilai-nilai dan jiwa kewirausahaan petani dan nelayan di kalangan petani nelayan.

Sasaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani KTNA yaitu:

- 1) Pengurus KTNA Kabupaten dan pengurus KTNA di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, petugas teknis pada kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan.
- 2) Instansi terkait dinas lingkup pertanian di tingkat Kabupaten dan kabupaten/kota, serta pengurus kelembagaan petani.

5. Waktu dan Tempat

Koordinasi dan survey Lokasi pelaksanaan PEDTA ke XVI di Kabupaten 4 Lawang tanggal 2-3 Desember 2024 dilaksanakan di ruang tamu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 4 Lawang untuk pembahasan dan diskusi terkait progress persiapan pelaksanaan PEDTA tahun 2025. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Kasi Sumber Daya Pangan yang didampingi oleh Panitera Kabupaten 4 Lawang Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Penyuluhan dan beberapa penyuluh pertanian.

6. Hasil Rembug

telah didapati hasil koordinasi bersama dengan Panitera Kabupaten 4 Lawang sebagai berikut :

- ❖ Pelaksanaan PEDTA KTNA Provinsi Sumatera Selatan ke-XVI direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten 4 Lawang pada Bulan November 2025, sambil menunggu hasil Rembug Persiapan dan Pemantapan yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 oleh Pemkab 4 Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Penetapan Tanggal PEDTA akan diumumkan setelah adanya pertemuan dengan Pemkab Kab 4 Lawang beserta OPD Kabupaten 4 Lawang yang terkait.
- ❖ Kegiatan PEDTA KTNA ke XVI telah dianggarkan melalui Anggaran APBD Kabupaten 4 Lawang Tahun 2025.

- ❖ Telah disusun pedoman dan juknis kegiatan PEDTA KTNA ke XVI yang merupakan acuan pelaksanaan PEDTA.
- ❖ Kegiatan Pembukaan dan Penutupan akan dilaksanakan di Jalan Pulo Mas, Pajar Bakti, Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan telah disiapkan lahan seluas 2 hektar sebagai Lokasi utama dan 1 hektar lokasi kegiatan gelar teknologi dan lahan parkir.
- ❖ Pada bulan Februari 2025 akhir akan direncanakan Rembug Persiapan PemKab 4 Lawang beserta jajarannya Bersama Panitia KTNA Provinsi di Palembang.
- ❖ Hasil ini sebagai bahan untuk mempersiapkan masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengirimkan peserta PEDTA untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Dokumentasi



Adapun hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (KTNA) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (KTNA) tahun 2024 dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2024 yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2024.

2. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (KTNA) Tahun 2024, yaitu :

1. Koordinasi dan Survey Lokasi Pekan Daerah (PEDA) KTNA di Kabupaten 4 Lawang yang direncanakan pelaksanaannya dibulan November 2025.
2. Pembinaan KTNA Kabupaten/kota berupa Rembug-Rembug dan Pembinaan KTNA di Kabupaten/Kota yaitu : Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, OKI, OKU Timur, Ogan Ilir, Pagar Alam dan Lubuk Linggau.
3. Pembinaan dan Rembug Paripurna, Rembug Madya KTNA di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
4. Rembug Paripurna Kelompok Wanita Tani Nelayanan dan Pemuda Tani Nelayanan KTNA Provinsi Sumatera Selatan
5. Koordinasi Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) ke XVI Kontak Tani Nelayan Andalan tingkat Provinsi Sumatera Selatan direncanakan pelaksanaannya dibulan November 2025.
6. Koordinasi Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) ke XVII di Provinsi Gorontalo, pada Bulan Juni Tahun 2026.
7. Kegiatan Rembug Utama, HUT KTNA dan Expo KTNA Nasional Tahun 2024.
8. Evaluasi kegiatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024 dan rencana program kegiatan tahun anggaran 2025.

9. Koordinasi dan Konsultasi ke pusat kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (KTNA) Tahun 2025.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa isu penting yang perlu perhatian dalam rangka pencapaian sasaran. Isu-isu penting tersebut adalah :

A. Ketahanan Pangan

1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Analisa NBM dan PPH Ketersediaan Tahun 2023, sebagai berikut :

- Adanya perubahan Aplikasi penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan Pangan yang terbaru, sehingga untuk penyusunan Analisa NBM dan PPH Ketersediaan Pangan perlu adanya penyesuaian data-data serta sosialisasi penggunaan sistem aplikasi yang terbaru.
- Sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan terutama data ekspor dan impor (keluar masuk bahan pangan antar wilayah) dari dinas terkait seperti data ketersediaan minyak goreng, gula pasir. Kedelai, tepung gandum, ikan air tawar dll.
- Terbatasnya SDM yang mampu menganalisis laporan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan baik di tingkat Provinsi maupun aparat ketahanan pangan di kabupaten/kota.
- Sering terjadinya mutasi pegawai yang menangani penyusunan NBM dan PPH Ketersediaan Pangan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang mengakibatkan tidak tersediaanya

aparatus yang mampu dan memahami penyusunan laporan analisis Neraca Bahan Makanan.

- Terbatasnya anggaran di masing-masing OPD Ketahanan Pangan dan belum adanya dukungan dana APBD Kabupaten/Kota untuk penyusunan Laporan Analisa NBM dan PPH Ketersediaan Pangan setiap tahun nya.

Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi, sebagai berikut :

- Masih kurangnya sosialisasi program kegiatan Penanganan Kerawanan pangan terhadap anggota kelompok sasaran, pendamping, tim pangan desa serta aparat desa setempat sehingga arah program kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Pengolahan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi belum dipahami secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program Penanganan Kerawanan Pangan.
- Masih terbatasnya jumlah bantuan usaha kelompok yang diberikan kepada masyarakat di masing-masing desa sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing anggota kelompok dan berdampak secara ekonomis terhadap kegiatan usaha anggota kelompok.
- Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan sehingga dirasakan belum berpengaruh banyak terhadap peningkatan usaha kelompok serta pendapatan anggota kelompok.
- Bantuan yang diberikan masih dilaksanakan secara perorangan belum dilaksanakan secara berkelompok.

- Belum adanya Dukungan dana APBD Kabupaten/Kota untuk pembinaan dan penguatan modal usaha kelompok di desa mandiri pangan.
- Pembinaan aparat terkait dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terbatas dalam 1 (satu) tahun hanya dilakukan pembinaan 1-2 kali saja.

2. Aspek Distribusi dan Harga Pangan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Tahun 2023 adalah :

- ElNino Tahun 2023 telah mempengaruhi stabilitas harga pangan pokok strategis. Komoditi pertanian sangat tergantung pada iklim, sangat rentan rusak atau produksi kurang akibat gangguan cuaca, sehingga jika produksi menurun atau gagal panen akibat gangguan cuaca akan sangat mempengaruhi stabilitas harga ;
- Kesenjangan Pasokan pangan Antar waktu & Antar daerah ;
- Kenaikan Harga Komoditas Global, terutama komoditas impor akan mempengaruhi harga di tingkat eceran ;
- Kenaikan Permintaan menjelang HBKN.

Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan adalah :

- Partisipasi pengurus dan anggota Gapoktan/LUPM masih belum optimal akibat kurang memahami tugas dan fungsi masing-masing;
- Kurangnya pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dikarenakan keterbatasan dana operasional sehingga pembinaan dan pendampingan belum optimal
- Kurangnya pembinaan dari tim teknis dikarenakan keterbatasan dana operasional sehingga pembinaan dan pendampingan khususnya untuk pelaporan dan administrasi sering mengalami kendala;

- LUPM/Gapoktan belum sepenuhnya menjadwalkan pembelian gabah pada waktu panen, sehingga stok gudang sering mengalami kekosongan.
- Adanya perubahan regulasi dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) tentang kualitas mutu beras.
- Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan belum seluruhnya terinfo ke masyarakat luas.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah adalah :

- Target cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/PERMENTAN/KN.130/42018 adalah 818 namun karena keterbatasan anggaran maka pencapaian target tersebut masih sulit direalisasikan.
- Daerah yang terdampak oleh bencana alam sering terisolir sehingga sulit untuk dijangkau, menyebabkan pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah sering terlambat diterima oleh masyarakat.

3. Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal adalah :

- minimnya media promosi konsumsi pangan B2SA;
- sulitnya merubah paradigma masyarakat untuk mengubah pola konsumsi pangan menjadi B2SA, bahwasanya ini bukan hanya kegiatan tetapi hal prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari;
- kurangnya tenaga penyuluh untuk penyebarluasan informasi dan kurangnya dana untuk penyebaran informasi baik di radio, poster dll;

- dan kurangnya koordinasi dan Kerjasama antara instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Permasalahan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA adalah :

- Kondisi cuaca yang panas dan kurangnya persediaan air untuk menyiram tanaman sehingga pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi agak terlambat;
- Gangguan hama Thrips dan penyakit pada tanaman sayuran;
- Ada kematian ikan lele akibat stress di awal dan stress saat penyortiran pada beberapa kelompok karena kualitas air kurang bagus dan cuaca yang panas;
- Masih kurangnya pendampingan dalam melaksanakan budidaya tanaman sayuran terutama dalam hal pengolahan media tanam dalam polybag dan kebun kelompok (perbandingan komposisi pupuk kimia, pupuk kandang), proses perlakuan benih tanaman, penghitungan jumlah benih/bibit yang tumbuh sampai dengan pemeliharannya begitu juga dengan tehnik budidaya ikan;
- Masih kurangnya pemahaman kelompok dalam hal tertib administrasi (buku kas, buku penjualan, buku distribusi bibit, notulen dan lain-lain);
- Tidak semua anggota kelompok bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan karena masih fokus pada aktifitas utama untuk mendapatkan pendapatan dan sulitnya merubah mindset anggota kelompok dari “pembeli menjadi penghasil” sehingga bantuan yang diterima belum dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan dan Isu Strategis Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Evaluasi Konsumsi per Kapitan per Tahun yaitu :

- Persediaan pangan, tingkat pendapatan, pengetahuan gizi, besarnya keluarga kebiasaan makan merupakan pola konsumsi yang biasanya rutin dilakukan dan sukar untuk mengubah
- Masih tingginya konsumsi padi-padian, minyak dan lemak, pangan hewani
- Pentingnya perencanaan pangan berbasis data konsumsi
- Kualitas konsumsi pangan penduduk belum mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Tahun 2023 secara umum dapat terlaksana namun ada beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Masih adanya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar dipasar (Pasar Tradisional dan Pasar Modern) yang masih mengandung cemaran bahan pestisida hal ini terjadi karena terlalu dekatnya waktu penyemprotan hama dengan masa panen serta tidak dilakukan pencucian Produk sebelum dipasok kepasar.
- Masih kurangnya pengawasan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ada ditingkat produsen, pemasok/ritel dan Penjual/Pedagang karena keterbatasan anggaran serta dukungan dan kerjasama dari pihak pengusaha/pelaku peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mulai dari Free Market sampai ke Post Market.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 secara umum dapat terlaksana namun ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk penerapan Higiene Sanitasi dalam penganganan PSAT.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) akan pentingnya registrasi dan sertifikasi produk

pangan segar asal tumbuhan sebagai jaminan keamanan pangan produk yang dihasilkan.

- Belum berpengaruh banyak bagi pelaku usaha dengan adanya kepemilikan Sertifikat prima-2 dan prima-3 sebagai jaminan keamanan dan mutu PSAT dirasakan oleh sebagian pelaku usaha terhadap nilai jual/daya saing produk secara signifikan.
- Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan bekerjasama dengan PT. Saraswanti Indo Genetech, Bogor pada saat pengiriman sampel memakan waktu cukup lama dan dikhawatirkan Sampel PSAT rusak dan berkurang mutunya.

Isu Strategis Pelaksanaan Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab./Kota adalah :

- Perlunya dukungan pemerintah dalam pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan baik provinsi maupun Kab/Kota guna memastikan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di post market memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan secara kontinyu dengan melibatkan Tim Jejaring Keamanan Pangan, baik pengawasan keamanan pangan pada Hari-hari Besar keagamaan (HBKN), maupun pengawasan keamanan pangan di Kabupaten/Kota dengan melibatkan stakeholder setempat.
- Penyediaan alat-alat uji cepat sampel pangan segar seperti Rapid Tes Kit.
- Pelaksanaan pengujian sampel pangan segar asal tumbuhan di laboratorium.
- Penyediaan sarana promosi tentang pentingnya keamanan pangan untuk dikonsumsi dalam keluarga.

B. Peternakan

1. Arus supply demand komoditi peternakan sepanjang tahun tidak stabil. Permintaan dan penawaran hasil ternak seperti daging, telur dan susu sering berfluktuasi. Pada saat tertentu permintaan daging dan telur meningkat, antara lain menghadapi hari-hari besar keagamaan, Perayaan akhir tahun dan permintaan akhir pekan. Oleh karena itu seringkali keberlanjutan usaha peternakan dalam skala kecil / rumah tangga kurang dan bahkan tidaklah mendatangkan keuntungan,. Maka usaha tersebut lebih dapat dikatakan hanya sebagai usaha sambilan/sampingan.
2. Ancaman persaingan produk nasional dan international. Produksi hasil peternakan terus mengalami kemajuan baik dalam penanganan produksi hasil ternak maupun penanganan pasca panen. Namun hasil olahan produk peternakan, terutama yang berbahan daging dan susu umumnya masih belum memenuhi standar Nasional Indonesia (SNI) dalam hal pengolahan hasil dan permintaan pasar.
3. Akselerasi pembangunan Peternakan berjalan lamban. Percepatan pelaksanaan Pembangunan Peternakan seringkali terkendala pada Infrastruktur pendukung seperti akses jalan produksi, sumber mata air, kawasasn hijauan makanan ternak dan terbatasnya bahan baku lokal untuk pakan ternak.
4. Ancaman pencurian ternak di sentra-sentra produksi. Masih terjadinya pencurian ternak didaerah sentra produksi peternakan terutama sapi potong. Kerawanan ini sebagai akibat dari keadaan sosial kemasyarakatan yang masih berkualitas rendah baik dari taraf hidup maupun pengetahuan keagamaan. Karena komoditi ini sangat mudah untuk dijual, yang disebabkan permintaan akan daging masih cukup tinggi. Mengenai hal ini sangat perlu mendapat perhatian dari pihak

berwenang, guna menjamin keberlanjutan usaha peternakan yang aman dan menguntungkan.

5. Aksesibilitas peternak dalam pemanfaatan modal kredit masih terbatas. Pemanfaatan modal oleh petani belum optimal, padahal banyak peluang untuk memperoleh kredit usaha peternakan, seperti kredit KKPE, KUPSP dan CRS Perusahaan. Keterbatasan pemanfaatan modal melalui pola kredit seringkali terkendala masalah penjaminan (borg).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan akan difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Distribusi, Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan yang Baik;
2. Terwujudnya Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman;
3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Rawan Pangan;
4. Meningkatnya produksi daging, susu dan telur.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional

Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Sedangkan kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 277 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD).

Kebijakan nasional dan isu strategi kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai prioritas sebagai berikut:

1. Penajaman Program Penanggulangan Kemiskinan
 - 1) Fokus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan lapangan kerja melalui program ***Pro-Poor***
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah hasil Pertanian :
 - 1) Pengembangan cadangan pangan pemerintah desa maupun masyarakat
 - 2) Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - 3) Peningkatan Mutu Produk Pangan pokok (beras) dalam rangka penguatan cadangan pangan

- 4) Penanganan Daerah Rawan Pangan, masyarakat rentan pangan dan balita kekurangan energi protein (KEP)
- 5) promosi, sosialisasi dan edukasi pangan B2SA ke sekolah-sekolah Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Pangan
- 6) Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani bidang pangan.

Sedangkan pada Dokumen RPJMN 2020-2024 Kementerian Pertanian bahwa secara nasional Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan hewan mendukung 4 (empat) tujuan pembangunan pertanian secara keseluruhan pada Kementerian Pertanian. Adapun empat tujuan dimaksud adalah :

- 1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian;
- 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selanjutnya untuk mewujudkan empat tujuan tersebut, ada 5 (lima) Sasaran yaitu ;

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- 4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- 6) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- 7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- 8) Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- 9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Oleh karena itu sangat tepat bila pada RPJMD Provinsi dan Renstra OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tercantum juga sasaran produksi

daging secara keseluruhan dan daging sapi secara khusus, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

a. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja OPD ini adalah :

1. Menyelaraskan pandangan, pemahaman, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan dan strategi yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang peternakan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan skala prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan perencanaan pembangunan daerah umumnya.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang peternakan.
5. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam rangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di akhir tahun berjalan.

Sedangkan sasaran dari penyusunan Renja ini adalah merupakan pedoman untuk memberikan arah pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan didalam dokumen Renstra.

Bahwa perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) penyusunan rencana pembangunan;
- 2) penetapan rencana pembangunan;

- 3) pengendalian terhadap pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan terhadap agenda perencanaan;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. (i) langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat berkelanjutan, menyeluruh, dan terukur; (ii) Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan; (iii) Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan (iv) langkah terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan peternakan, biasanya tertuang dalam renja (rencana kinerja).

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi dokumen rencana kegiatan (Rencana Kerja dan Anggaran) sehingga ada rencana kedepan untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Peternakan pertahun dan Rencana Pembangunan Peternakan lima tahunan ditetapkan didalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Sekretariat, Bidang dan UPTD. Selanjutnya Kepala Dinas bersama Sekretaris menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana

pembangunan dari masing-masing pimpinan Bagian, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan peternakan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan peternakan, setiap pimpinan unit bagian, bidang dan UPTD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan, meliputi :

1. Memantapkan ketersediaan pangan dengan Pola Pangan Harapan;
2. Meningkatnya penanganan rawan pangan dengan ditandai jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1 % setiap tahun;
3. Terlaksananya sistem distribusi yang efisien, efektif dan stabilitas harga pangan pokok strategis;
4. Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
5. Meningkatnya produksi hasil peternakan dan pendapatan peternak.
6. Meningkatnya pengembangan Kawasan Peternakan.
7. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Peternakan didasarkan pada proses penyusunan Perencanaan secara bertahap.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pad berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi

- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabisasi pasokan dan Harga Pangan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

- Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi per Kapita per Tahun.

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

URUSAN PEMERITAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi.

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- Penjaminan Peredaran Benih/bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan.

Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Penataan Prasarana Pertanian

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakann

- Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan.

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

- Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

Kesejahteraan Hewan

- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

9. Program Penyuluhan Pertanian

Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Adapun Daftar Usulan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2025				Rencana Tahun 2026	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			28.686.257.000			29.926.480.000
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			750.000.000			950.000.000
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	4 Dok	400.000.000	APBD Prov	4 Dok	500.000.000
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sumsel	6 Lap	100.000.000	APBD Prov	6 Lap	150.000.000
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	2 Lap	250.000.000	APBD Prov	2 Lap	300.000.000
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.029.887.000			23.967.376.000
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sumsel	141 Orang/bulan	20.869.887.000	APBD Prov	115 orang/bulan	23.792.376.000
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Sumsel	1 Dok	160.000.000	APBD Prov	1 Dok	175.000.000

	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75.000.000			450.000.000
	2.09.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Sumsel	243 paket	-	APBD Prov	243 Paket	300.000.000
	2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Sumsel	20 orang	75.000.000	APBD Prov	20 Orang	150.000.000
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			750.500.000			1.030.000.000
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	8 Paket	27.000.000	APBD Prov	8 Paket	50.000.000
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	34 Paket	100.000.000	APBD Prov	34 Paket	150.000.000
	2.09.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov. Sumsel	19 Paket	41.500.000	APBD Prov	19 Paket	45.000.000
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	20 Paket	50.000.000	APBD Prov	20 Paket	75.000.000
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Sumsel	2 Paket	75.000.000	APBD Prov	2 Paket	100.000.000
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov. Sumsel	4 Dok	7.000.000	APBD Prov	5 Dok	10.000.000
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sumsel	145 Laporan	450.000.000	APBD Prov	145 Laporan	600.000.000
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			305.000.000			435.000.000

2.09.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Unit	-	APBD Prov	1 Unit	-
2.09.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Unit	-	APBD Prov	1 Unit	-
2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov. Sumsel	3 Paket	170.000.000	APBD Prov	3 Paket	235.000.000
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Sumsel	3 Unit	135.000.000	APBD Prov	3 Unit	200.000.000
2.09.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Prov. Sumsel	7 Unit	-	APBD Prov	7 Unit	-
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah			4.376.370.000			1.894.104.000
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Sumsel	1 Laporan	17.000.000	APBD Prov	1 Laporan	20.000.000
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Sumsel	4 Laporan	650.000.000	APBD Prov	4 Laporan	700.000.000
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	2 Laporan	3.709.370.000	APBD Prov	2 Laporan	1.174.104.000
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.399.500.000			1.200.000.000
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Sumsel	13 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	510.000.000	APBD Prov	13 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2	650.000.000
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Sumsel	2 Unit	156.000.000	APBD Prov	2 Unit	200.000.000

	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Sumsel	5 Unit	733.500.000	APBD Prov	5 Unit	350.000.000
2	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kenaikan SDM Peningkatan Kualitas Pangan			212.565.100			300.000.000
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			212.565.100			300.000.000
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Kab/Kota	65 unit	212.565.100	APBD Prov	70 unit	300.000.000
3	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stok Cadangan Pangan Daerah			2.235.000.000			2.450.000.000
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan			610.000.000			650.000.000

2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Kab/Kota	4 Laporan	135.000.000	APBD Prov	4 Laporan	100.000.000
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Kab/Kota	-	-	APBD Prov	1 Laporan	150.000.000
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab/Kota	5 unit	300.000.000	APBD Prov	5 Unit	200.000.000
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Kab/Kota	1 Lap	-	APBD Prov	1 Lap	-
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab/Kota	1 Dok	175.000.000	APBD Prov	1 Dok	200.000.000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan			225.000.000			350.000.000
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kab/Kota	12 Ton	-	APBD Prov	15 Ton	-

	2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kab/Kota	12 Ton	225.000.000	APBD Prov	18 Ton	350.000.000
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi			1.400.000.000			1.450.000.000
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab/Kota	6 Dok	275.000.000	APBD Prov	8 Dok	350.000.000
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kab/Kota	1 Lap	1.000.000.000	APBD Prov	1 Lap	950.000.000
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab/Kota	1 Lap	125.000.000	APBD Prov	1 Lap	-
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Kab/Kota	1 Lap	-	APBD Prov	1 Lap	150.000.000
4	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan			500.000.000			1.016.184.351

	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			-			150.000.000
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Kab/Kota	Dok	-	APBD Prov	1 Dok	150.000.000
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			500.000.000			866.184.351
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kab/Kota	7 Dok	500.000.000	APBD Prov	8 Dok	866.184.351
5	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi/terregistrasi			600.000.000			825.000.000
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000			825.000.000
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab/Kota	40 Sertifikat	254.810.000	APBD Prov	45 Sertifikat	350.000.000

	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Kab/Kota	42 Dok	125.000.000	APBD Prov	55 Dok	175.000.000
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab/Kota	4 Dok	220.190.000	APBD Prov	6 Dok	300.000.000
6	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Saranan Pertanian	Persentase kenaikan produksi daging, susu, dan telur			1.285.000.000			2.033.000.000
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			310.000.000			400.000.000
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Dok	110.000.000	APBD Prov	1 Dok	150.000.000
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	1 Lap	200.000.000	APBD Prov	1 Lap	250.000.000

	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			625.000.000			983.000.000
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Kab/Kota	1 Lap	500.000.000	APBD Prov	1 Lap	783.000.000
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Kab/Kota	1 Dok	125.000.000	APBD Prov	1 Dok	200.000.000
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			-			50.000.000
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab/Kota	Lap	-	APBD Prov	1 Lap	50.000.000
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			350.000.000			600.000.000
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Kab/Kota	Dosis	-	APBD Prov	Dosis	-

	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Kab/Kota	3000 Ekor	350.000.000	APBD Prov	4000 Ekor	600.000.000
7	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Daging, Susu, Telur			1.376.500.000			1.540.000.000
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian			1.176.500.000			1.290.000.000
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab/Kota	1 Lap	75.000.000	APBD Prov	1 Lap	100.000.000
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab/Kota	4 Unit	-	APBD Prov	4 Unit	-
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab/Kota	1 Unit	701.500.000	APBD Prov	1 Unit	1.000.000.000
	3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Kab/Kota	1 Unit	400.000.000	APBD Prov	1 Unit	190.000.000

	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			200.000.000			250.000.000
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Kab/Kota	1 Lap	200.000.000	APBD Prov	1 Lap	250.000.000
8	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan			855.000.000			1.135.000.000
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			325.000.000			400.000.000
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab/Kota	1 Lap	325.000.000	APBD Prov	1 Lap	400.000.000

3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Kab/Kota	1 Unit	-	APBD Prov	1 Unit	310.000.000
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang terawasi			-			75.000.000
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab/Kota		-	APBD Prov	1 Lap	75.000.000
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			330.000.000			325.000.000
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab/Kota	1 Dok	330.000.000	APBD Prov	1 Dok	325.000.000
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			200.000.000			250.000.000
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Kab/Kota	15 Dok	200.000.000	APBD Prov	15 Dok	250.000.000

	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Persentase Kesejahteraan Hewan			-			85.000.000
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Kab/Kota	Sertifikat	-	APBD Prov	2 Sertifikat	85.000.000
9	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Lembaga Kelompok Masyarakat di tingkat petani dan peternak yang kompeten			5.417.434.900			7.100.000.000
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			5.117.434.900			5.300.000.000
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kab/Kota	324 Kelompok	5.117.434.900	APBD Prov	340 Kelompok	5.300.000.000
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			300.000.000			1.800.000.000
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Kab/Kota	17 Unit	300.000.000	APBD Prov	17 Unit	1.800.000.000
Jumlah						41.167.757.000			46.325.664.351

BAB IV.

PENUTUP

Demikian Rencanan Kinerja (Renja) 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan disusun untuk menjadi dasar dalam memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil kesepakatan dan consensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tergantung kepada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan dan pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diharapkan kesinambungan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana secara sinergis.